

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ENREKANG

Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Herman dan Andi Asrifan

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : ahmadmustanir74@gmail.com, mrairahmat@gmail.com,

herman43151023@gmail.com, andiasrifan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang, mengetahui pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan mengetahui seberapa besar implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, studi kepustakaan, dan wawancara. Analisis data kuantitatif dengan analisis distribusi frekuensi dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan pemerintah termasuk kategori kurang baik dengan rata-rata persentase sebesar 58,7%. 2) Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk kategori baik dengan rata-rata persentase sebesar 69,3%, dan 3) Implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui output data dari tabel summary R^2 sebesar 0,539 atau 53,9%. Nilai $t_{hitung} = 10,697 > t_{tabel} = 2,626$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) terhadap variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y).

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.

Abstract

This study aims to determine the implementation of government policies in Enrekang Regency, to find out the fulfillment of the rights of persons with disabilities and to find out how much the implementation of government policies towards the fulfillment of the rights of persons with disabilities in Enrekang Regency is. Data collection techniques using observation, questionnaires, literature study, and interviews. Quantitative data analysis with frequency distribution analysis and simple linear regression analysis. The results of the study show that: 1) The implementation of government policies is in the poor category with an average percentage of 58.7%. 2) The fulfillment of the rights of persons with disabilities is in the good category with an average percentage of 69.3%, and 3) The implementation of government policies affects the fulfillment of the rights of persons with disabilities, this is evidenced by the output data from the summary table R^2 of 0.539 or 53.9%. The value of $t_{count} = 10,697 > t_{table} = 2,626$ with a significance value of $0.000 < 0.05$. So that there is a significant (significant) effect on the variable of government policy implementation (X) on the variable of fulfilling the rights of persons with disabilities (Y).

Keywords : Policy Implementation, Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan baik fisik, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama, ini dapat membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan warga negara lainnya. Dalam Undang-Undang No. 8 / 2016 Pasal 2 Bab I tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa kesetaraan dan non diskriminasi adalah salah satu hal syarat dari terbukanya berbagai akses bagi para penyandang disabilitas. Pelanggaran terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi, hak asasi bagi penyandang disabilitas sering diabaikan. Hal ini karena pandangan masyarakat kepada para penyandang disabilitas bukan sebagai warga negara dan manusia pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat Kabupaten berkeinginan secara aktif meneguhkan dan merepresentasikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Di tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas dimulai dari bentuknya Perda yang memberikan jaminan pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Pemda Enrekang mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Dimana masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, sasaran, kesempatan. Pemerintah kabupaten selaku pelaksana teknis penyandang disabilitas, serta pengadaan sarana prasarana merupakan faktor penunjang untuk penyandang disabilitas (Bab 1 Pasal 1) seperti yang telah dijelaskan dalam perda tersebut.

Observasi awal di lapangan pada tanggal 18 Februari 2020, peneliti menemukan masalah yang terjadi yaitu hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang sebanyak 2.055 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.057 orang dan perempuan sebanyak 998 orang. Mayoritas penyandang disabilitas menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan yang tidak layak seperti penjual kaki lima, tuna netra bahkan menjadi pengemis, mata pencaharian tersebut hanya memberikan masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada realisasi peraturan daerah masih didapatkan hambatan pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas, pembahasan terkait penyandang disabilitas sangat jarang didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas dipandang hanya sebagai proyek bantuan dan pemberian jaminan belaka, bukan pada pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Dimana hal ini yang menimbulkan mentalitas para penyandang disabilitas bergantung pada orang lain¹.

Penyandang disabilitas kerap diidentikkan dengan kemiskinan disebabkan berkebutuhan khusus dan kemampuan maupun potensi yang dimiliki tidak mampu diaktualisasikan, olehnya pemerintah Kabupaten Enrekang perlu memperhatikan terhadap penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Perlindungan kepada mereka sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan perhatian yang serius, disebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat rentan dialami bagi penyandang disabilitas.

¹ Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang," *Jurnal Fakultas Hukum. UNDIP*, 2018.

Tingkat pengetahuan pada keluarga yang rendah dalam memperlakukan anggota keluarganya bagi penyandang disabilitas sehingga menjadikan faktor tindak kekerasan dan sejenisnya yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. Olehnya Perda Nomor 8/2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu ditinjau kembali pelaksanaannya dalam memberikan jaminan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas².

George C. Edwards III dalam³⁴ keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu : (1) Komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi terhadap komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai pentingnya penyampaian kepada pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat memahami apa yang seharusnya mereka persiapkan dan lakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat dicapai sesuai yang diinginkan. (2) Sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan. (3) Disposisi. Disposisi merupakan kecenderungan “kemauan, keinginan melaksanakan kebijakan secara totalitas sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. (4) Struktur birokrasi. Karakteristik dalam struktur birokrasi ada dua yaitu “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operational Procedure* (SOP) adalah perkembangan dari tuntunan internal akan efektifitas, sumber daya serta kebutuhan penyesuaian dalam organisasi kerja yang luas. Fragmentasi merupakan pelimpahan wewenang kebijakan kepada badan yang berbeda sehingga di butuhkan untuk saling koordinasi.⁵⁶⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu implementasi kebijakan pemerintah disebut sebagai variabel X (independen) dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai variabel Y (dependen). Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan tipe

² Ahmad Mustanir et al., “Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning,” *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 2018, 110 – 115, https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.

³ Ilham Arif Sirajuddin, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar,” *Ilmu Administrasi Publik*, 2014.

⁴ Ahmad Mustanir and Darmiah Darmiah, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEJAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 225–38, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.

⁵ Ahmad Mustanir et al., “Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2, no. 2 (2019): 94–114.

⁶ Monalisa Ibrahim et al., *Sistem Manajemen Administrasi Data Kependudukan Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesia, issued 2020)*, <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=o7RBQFZL2qpxz5QfP%2BUJ1ZQczleJs9sfccx2wz%2FHaw%3D>.

⁷ Muhammad Rais et al., “Effects of ICT Application (Information Communication and Technology) Towards the Transformation of Regional Bureaucracy,” in *The Innovation of Big Data and Artificial Intelligent Technology for Public Sector: A Call for Actions* (Yogyakarta: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>.

penelitian asosiatif. Pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, kuisioner, studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan program SPSS 20.0 *for windows*. Hasil analisis berupa analisis distribusi frekuensi, uji kualitas data, uji normalitas, dan analisis regresi linear sederhana.⁸

Penggunaan definisi operasional variabel Implementasi Kebijakan (X) yang dimaksudkan disini adalah penerapan aturan dalam mewujudkan kebutuhan bagi para penyandang disabilitas. Indikatornya adalah : Komunikasi, yaitu interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan. Sumber daya, yaitu potensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi yaitu, keinginan dalam menjalankan kebijakan serta Struktur birokrasi yaitu, pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan. Variabel Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas (Y) yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan dalam memenuhi milik bagi penyandang disabilitas. Indikatornya adalah: Kesempatan yaitu peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak. Aksesibilitas yaitu pemberian jalan pada penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Rehabilitasi yaitu proses perawatan pada penyandang disabilitas serta perlindungan khusus yaitu pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah (X)

1. Komunikasi

Tanggapan responden tentang indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Komunikasi

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	22	88	22
3.	Cukup	3	40	120	40
4.	Kurang	2	28	56	28
5.	Tidak Baik	1	10	10	10
Jumlah			100	274	100%
274					
Skor rata-rata=		$= 2,74/5 \times 100\% = 54,8 \%$			
100					

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Frekuensi jawaban responden tentang komunikasi disajikan pada tabel 1. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan di Kabupaten Enrekang.

2. Sumber Daya

Tanggapan responden tentang indikator sumber daya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Sumber Daya

⁸ Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," Bandung: Alfabeta, 2015.

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	19	76	19
3.	Cukup	3	63	189	63
4.	Kurang	2	8	16	8
5.	Tidak Baik	1	10	10	10
Jumlah			100	291	100%

291
Skor rata-rata= $= 2,91/5 \times 100\% = 58,2\%$
100

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Frekuensi jawaban responden tentang sumber daya disajikan pada tabel 2. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan potensi yang ada pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di Kabupaten Enrekang.

3. Disposisi

Tanggapan responden tentang indikator disposisi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Disposisi

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	22	88	22
3.	Cukup	3	40	120	40
4.	Kurang	2	27	54	27
5.	Tidak Baik	1	11	11	11
Jumlah			100	273	100%

273
Skor rata-rata= $= 2,73/5 \times 100\% = 54,6\%$
100

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Frekuensi jawaban responden tentang disposisi disajikan pada tabel 3. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan keinginan dalam menjalankan kebijakan di Kabupaten Enrekang.

4. Struktur Birokrasi

Tanggapan responden tentang indikator struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Struktur Birokrasi

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	52	208	52
3.	Cukup	3	31	93	31
4.	Kurang	2	17	34	17
5.	Tidak Baik	1	-	-	-
Jumlah			100	335	100%
335					
Skor rata-rata= $\frac{335}{100} = 3,35/5 \times 100\% = 67\%$					

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Frekuensi jawaban responden tentang disposisi disajikan pada tabel 4. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan implementasi kebijakan pemerintah dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Enrekang

No.	Implementasi Kebijakan Pemerintah	Persentase (%)
1.	Komunikasi	54,8
2.	Sumber daya	58,2
3.	Disposisi	54,6
4.	Struktur birokrasi	67
Jumlah		234,6
<u>234,6</u>		
Skor rata-rata= $\frac{234,6}{4} = 58,7\%$		

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur bagaimana implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang. Adapun indikator yang pertama adalah komunikasi dengan rata-rata persentase sebesar 54,8% . Nilai 54,8% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik), dimana diperlukan interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan. Indikator yang kedua adalah sumber daya dengan rata-rata persentase sebesar 58,2%. Nilai 58,2% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik), dimana diperlukan potensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Indikator yang ketiga adalah disposisi dengan rata-rata persentase sebesar 54,6% termasuk kategori cukup baik, dimana dibutuhkan keinginan dalam menjalankan kebijakan. Indikator yang keempat

adalah struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67% termasuk kategori baik, dimana dibutuhkan pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan di Kabupaten Enrekang.

Pada akhirnya ditemukan bahwa dari keempat indikator implementasi kebijakan pemerintah, yang paling dominan adalah indikator struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67%. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu indikator ketiga dengan rata-rata persentase sebesar 54,6%.

Dari hasil rekapitulasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang didapatkan rata-rata persentase sebesar 58,7% menurut⁹ nilai 58,7% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori kurang baik). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad Afdal Karim¹⁰ dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Enrekang” mendapatkan hasil sebesar 61% dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdal Karim dari segi lokasi penelitian, jumlah sampel dan indikator yang diterapkan. Dimana indikator yang digunakan oleh Muhammad Afdal Karim adalah indikator yang berasal dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Pemenuhan Hak Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, memiliki empat indikator pengukuran yaitu struktur birokrasi, anggaran, lingkungan dan sosial. Hasil penelitian Muhammad Afdal Karim menunjukkan bahwa peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan penelusuran data melalui wawancara pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Enrekang (Bapak Zulkarnain Kara, A.P., M.Si), beliau mengatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Sosial menjadi pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat Kabupaten semaksimal mungkin meneguhkan kebijakan terkait perlindungan dan jaminan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di daerah. Langkah awal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dimulai dari dibentuknya peraturan daerah yang memberikan jaminan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Y)

1. Kesempatan

Tanggapan responden tentang indikator kesempatan dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Kesempatan

⁹ Sugiyono, *Quantitative Research Methods, Qualitative and R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016).

¹⁰ Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar,” 2018.

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	5	22	110	22
2.	Baik	4	30	120	30
3.	Cukup	3	31	93	31
4.	Kurang	2	17	34	17
5.	Tidak Baik	1	-	-	-
Jumlah			100	357	100%

357

Skor rata-rata = $\frac{357}{100} = 3,57/5 \times 100\% = 71,4\%$

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang.

2. Aksesibilitas

Tanggapan responden tentang indikator aksesibilitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Aksesibilitas

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	58	232	58
3.	Cukup	3	42	86	42
4.	Kurang	2	-	-	-
5.	Tidak Baik	1	-	-	-
Jumlah			100	318	100%

318

Skor rata-rata = $\frac{318}{100} = 3,18/5 \times 100\% = 63,6\%$

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pemberian jalan pada penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya di Kabupaten Enrekang.

3. Rehabilitasi

Tanggapan responden tentang indikator rehabilitasi dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Rehabilitasi

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	5	20	100	20
2.	Baik	4	30	120	30

3.	Cukup	3	30	90	30
4.	Kurang	2	20	40	20
5.	Tidak Baik	1	-	-	-
Jumlah			100	350	100%
350					
Skor rata-rata=		$= 3,5/5 \times 100\% = 70\%$			
100					

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan proses perawatan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

4. Perlindungan kasus

Tanggapan responden tentang indikator perlindungan khusus dapat dilihat pada table 9.

Tabel 9. Tanggapan Responden tentang Perlindungan Khusus

No.	Tanggapan Responden	Bobot	Frekuensi	Skor	Prosentase (%)
1.	Sangat Baik	5	-	-	-
2.	Baik	4	60	240	60
3.	Cukup	3	40	120	40
4.	Kurang	2	-	-	-
5.	Tidak Baik	1	-	-	-
Jumlah			100	360	100%
360					
Skor rata-rata=		$= 3,6/5 \times 100\% = 72\%$			
100					

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Enrekang

No.	Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Persentase (%)
1.	Kesempatan	71,4
2.	Aksesibilitas	63,6
3.	Rehabilitasi	70

4.	Perlindungan khusus	72
	Jumlah	277
Skor rata-rata=	$\frac{277}{4}$	= 69,3 %

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Dari tabel 10. dapat diketahui bahwa terdapat indikator kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, dan perlindungan khusus dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

Adapun indikator yang pertama adalah kesempatan dengan rata-rata persentase sebesar 71,4% termasuk kategori baik, dimana diperlukan peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua adalah aksesibilitas dengan rata-rata persentase sebesar 63,6% termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jalan pada penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya di Kabupaten Enrekang. Indikator yang ketiga adalah rehabilitasi dengan rata-rata persentase sebesar 70% termasuk kategori baik, diperlukan dimana proses perawatan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Indikator yang keempat adalah perlindungan khusus dengan rata-rata persentase sebesar 72% termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

Pada akhirnya ditemukan bahwa dari keempat indikator pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang paling dominan adalah indikator perlindungan khusus dengan rata-rata persentase sebesar 72%. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu indikator kedua dengan rata-rata persentase sebesar 63,6%.

Dari hasil rekapitulasi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang didapatkan rata-rata persentase sebesar 69,3%. Nilai 69,3% termasuk dalam range pengukuran 61-80% (termasuk dalam kategori baik)¹¹. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Eta Yuni, Slamet Sumarto, Noorrochmat Isdaryanto dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Cacat” mendapatkan hasil sebesar 63% dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eta Yuni, Slamet Sumarto, Noorrochmat Isdaryanto dari segi lokasi penelitian, jumlah sampel dan indikator yang diterapkan. Dimana indikator yang digunakan oleh Eta Yuni, Slamet Sumarto, Noorrochmat Isdaryanto adalah indikator yang berasal dari teori pemenuhan hak penyandang cacat yang dikemukakan oleh Saleh Ismail¹² memiliki tujuh indikator pengukuran yaitu penghormatan, otonomi individual, kebebasan menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan, nondiskriminasi, partisipasi penuh efektif, penghormatan pada

¹¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).”

¹² Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang.”

penyandang disabilitas sebagai keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, aksesibilitas, dan kesetaraan gender.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan penelusuran data melalui wawancara pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Enrekang (Sukma Dani, S.Pd., M.Pd), beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah memberikan perhatian yang serius pada perlindungan penyandang disabilitas karena adanya perlakuan diskriminatif dan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya”.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan korelasi item-total dikoreksi (*corrected item-total correlation*) untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 *for windows*.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah). Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	8.99	3.404	.685	.571
X2	8.82	4.048	.561	.655
X3	9.00	4.162	.404	.749
X4	8.38	4.460	.478	.701

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel hasil olahan uji validitas di atas, diketahui bahwa 4 item pertanyaan (indikator implementasi kebijakan pemerintah) yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari $> 0,25-0,30$ (*corrected item-total correlation* $> 0,25-0,30$).

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	10.68	2.240	.386	.463
Y2	10.67	3.456	.407	.485
Y3	10.75	2.391	.314	.544
Y4	10.65	3.402	.445	.467

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel hasil olahan uji validitas di atas, diketahui bahwa 4 item pertanyaan (indikator pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) yang digunakan untuk mengukur variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari $> 0,25-0,30$ (*corrected item-total correlation* $> 0,25-0,30$).

2. Uji Reabilitas

Instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrument yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS 20,0 for windows. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah). Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.734	4

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel *reliability statistics* di atas, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) dikatakan reliabel atau handal karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0,734 yang berarti lebih besar dari 0,60 ($0,734 > 0,60$).

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas). Reliability Statistics

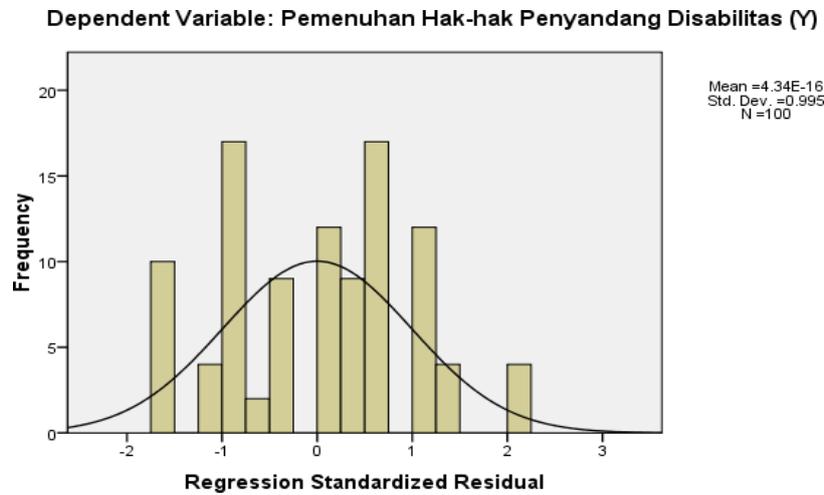
Cronbach's Alpha	N of Items
0.559	4

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel *reliability statistics* di atas, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) dikatakan tidak reliabel atau handal karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0,559 yang berarti lebih besar dari 0,60 ($0,559 < 0,60$).

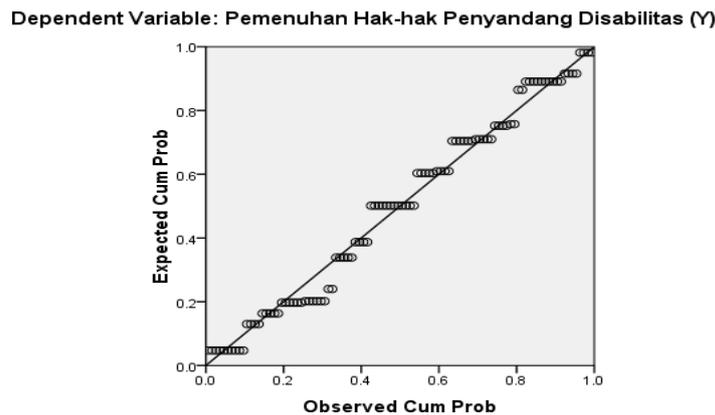
3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (ϵ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan grafik normal P-P *Plot* dalam program SPSS 20.0. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P *Plot*.



Gambar 1. Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Normal P-P Plot

Berdasarkan grafik normal P-P *Plot* hasil olah data, maka penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dilihat dari data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan pada *scatterplot* data menyebar yang menunjukkan bahwa data tersebut normal.

4. Analisis regresi linier sederhana

Koefisien

Persamaan analisis regresi linear sederhana disamakan menurut tabel *coefficients*, yang menyebutkan seberapa besar pengaruh variabel X (implementasi kebijakan pemerintah) terhadap variabel y (pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas).

Tabel 15. Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
--	-----------------------------	---------------------------

	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.159	0.678	0.734	10.554	.000
	Implementasi Kebijakan Pemerintah (X)	0.605	0.057		10.697	.000

a. Dependent Variable: Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Y)

Berdasarkan tabel *coeficent* pada tabel 4.18 diatas, maka diperoleh nilai konstanta “a” adalah 7,159 sedangkan *coefficient* regresi “b” 0,605. Persamaan regresi linear sederhana, yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 7,159 + 0,605 X$$

Koefisien “b” dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konstanta sebesar 7,159 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai implementasi kebijakan pemerintah atau nilai $X = 0$ maka pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas menjadi 7,159 atau sama dengan nilai konstanta. (2) Koefisien regresi X sebesar 0,605 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka nilai implementasi kebijakan pemerintah bertambah sebesar 0,605. Maka nilai pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas menjadi lebih baik.

Model Summary

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka dapat dilihat dari nilai R Square yang diperoleh dari hasil analisis data dengan SPSS Versi 20.0 yaitu tabel model *summary*.

Tabel 16. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.734 ^a	0.539	0.534	1.440

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan Pemerintah (X)

b. Dependent Variable: Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Y)

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,539 yang disebut dengan koefisien determinasi dan merupakan hasil dari penguadratan R yang mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah sebesar 53,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengumpulan data dari observasi,

kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti. Data observasi, kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kuantitatif* dengan bantuan tabel frekuensi dan analisis regresi linear sederhana.

Hasil pengolahan data dengan analisis regresi sederhana melalui olahan SPSS menjelaskan bahwa variabel implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini mengindikasikan bahwa apabila implementasi kebijakan di Kabupaten Enrekang lebih maksimal maka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga akan meningkat. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) antara implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis yang menunjukkan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,734.

Kebijakan publik dipandang sebagai sebuah upaya pelaksanaan kegiatan sistem yang bergerak dari satu titik menuju titik lain secara berkesinambungan, yang saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat mendasar disebabkan menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sebelum di implementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduruan karena gagal mencapai maksud dan tujuan.

Implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang diharapkan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta kesetaraan dan non diskriminasi sebagai salah satu hal syarat dari terbukanya berbagai akses bagi para penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat Kabupaten berkeinginan untuk secara aktif meneguhkan dan merepresentasikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari bentuknya peraturan daerah yang akan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, buta, tuli, dan sebagainya. Menurut defenisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.

Adapun indikator yang pertama pada variabel implementasi kebijakan pemerintah adalah komunikasi dengan rata-rata persentase sebesar 54,8%. Nilai 54,8% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik)¹³, dimana diperlukan interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua adalah sumber daya dengan rata-rata persentase sebesar 58,2% menurut Sugiyono nilai 58,2% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik), dimana diperlukan

¹³ Sugiyono, *Quantitative Research Methods, Qualitative and R&D*.

potensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di Kabupaten Enrekang. Indikator yang ketiga adalah disposisi dengan rata-rata persentase sebesar 54,6% termasuk kategori cukup baik, dimana dibutuhkan keinginan dalam menjalankan kebijakan di Kabupaten Enrekang. Indikator yang keempat adalah struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67% termasuk kategori baik, dimana dibutuhkan pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan di Kabupaten Enrekang.

Adapun indikator yang pertama pada variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kesempatan dengan rata-rata persentase sebesar 71,4% termasuk kategori baik, dimana diperlukan peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua adalah aksesibilitas dengan rata-rata persentase sebesar 63,6% termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jalan pada penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya di Kabupaten Enrekang. Indikator yang ketiga adalah rehabilitasi dengan rata-rata persentase sebesar 70% termasuk kategori baik, diperlukan dimana proses perawatan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Indikator yang keempat adalah perlindungan khusus dengan rata-rata persentase sebesar 72% termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

Perhitungan tingkatan hubungan antara variabel implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga kuat, hal dilihat dari nilai *constant* (a) sebesar 7,159 sedangkan nilai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (X) adalah 0,605. Adapun persamaannya adalah $Y^{\wedge} = a + bX$ atau $Y^{\wedge} = 7,159 + 0,605 X$. Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Muhammad Afdal Karim¹⁴ yang menyatakan bahwa peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Sedangkan Ismail Shaleh (2018) juga mengungkapkan bahwa implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Semarang belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa hubungan implementasi kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Besarnya kontribusi variabel X (implementasi kebijakan pemerintah) terhadap variabel Y (pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) sebesar 53,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain implementasi kebijakan pemerintah, ada faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.

¹⁴ Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar."

Dapat analisis di atas menunjukkan bahwa hubungan implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang merupakan upaya pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memberikan perhatian yang serius terhadap penyandang disabilitas, disebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat rentan dialami bagi penyandang disabilitas. Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, sasaran, kesempatan. Pemerintah kabupaten selaku pelaksana teknis penyandang disabilitas, serta pengadaan sarana prasarana merupakan faktor penunjang untuk penyandang Disabilitas seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi kebijakan pemerintah (X) di Kabupaten Enrekang, meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis distribusi frekuensi pada variabel X (implementasi kebijakan pemerintah) maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 58,7 %, termasuk kategori kurang baik. Nilai 58,7% termasuk dalam range pengukuran 41-60%.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) di Kabupaten Enrekang, meliputi: kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, dan perlindungan khusus. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis distribusi frekuensi pada variabel Y (pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) dengan maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 69,3% termasuk kategori baik. Nilai 69,3% termasuk dalam range pengukuran 61-80%.

Berdasarkan hasil olahan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS 20.0, maka dapat diketahui implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui output data dari tabel summary R^2 sebesar 0,539 atau 53,9%. Nilai $t_{hitung} = 10,697 > t_{tabel} = 2,626$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Monalisa, Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Kamaruddin Sellang, Partisan Abadi, Muhammad Rusdi, Madaling Madaling, Andi Mahatir Akbar, and Umu Kalsum. Sistem Manajemen Administrasi Data Kependudukan Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia, issued 2020. <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=o7RBQFZL2qpxz5QfP%2BUJ1ZQzcJz9sfccx2wz%2FHaw%3D>.
- Karim, Muhammad Afdal. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar," 2018.
- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.
- Mustanir, Ahmad, Nur Justira, Kamaruddin Sellang, and Andi Ilham Muchtar.

- “Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning.” *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 2018, 110 – 115. https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.
- Mustanir, Ahmad, Muhammad Rohady Ramadhan, M Rais Rahmat Razak, Lukman Lukman, Sapri Sapri, and Takhrim Takhrim. “Peranan Camat Dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2, no. 2 (2019): 94–114.
- Rais, Muhammad, Rahmat Razak, Ahmad Mustanir, and Muhlis Madani. “Effects of ICT Application (Information Communication and Technology) Towards the Transformation of Regional Bureaucracy.” In *The Innovation of Big Data and Artificial Intelligent Technology for Public Sector: A Call for Actions*. Yogyakarta: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>.
- Shaleh, Ismail. “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang.” *Jurnal Fakultas Hiukum. UNDIP*, 2018.
- Sirajuddin, Ilham Arif. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar.” *Ilmu Administrasi Publik*, 2014.
- Sugiyono. *Quantitative Research Methods, Qualitative and R&D*. Bandung: PT Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, Prof. “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).” *Bandung: Alfabeta*, 2015.